

BAB II SEJARAH INGGRIS RAYA DAN RUSIA

A. Sejarah Awal Inggris Raya



Gambar 2.1 Peta Inggris Raya

Britania Raya atau Inggris Raya (*United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland*) merupakan sebuah negara berdaulat yang terletak di benua Eropa. Inggris Raya merupakan sebuah negara kesatuan yang diatur dibawah monarki konstitusional dan sistem parlementer. Dalam kedaulatan Inggris Raya atau yang terkenal dengan nama *United Kingdom* terdapat empat negara yang masing-masing berdiri sendiri yaitu Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Ibu kota Inggris Raya terletak di London yang juga merupakan ibu kota Inggris. Pada saat ini kekuasaan monarki dipimpin oleh Ratu Elizabeth II yang naik tahta pada 6

Februari 1952, sedangkan kekuasaan parlementer dipimpin oleh Perdana Menteri Theresa May yang dilantik pada 13 Juli 2016 (United Kingdom country profile, 2018).

Sejarah awal pembentukan dan berdirinya Inggris Raya berawal dari kedatangan dan pendudukan suku Iberius dan suku Beaker ke Inggris. Sejak saat itu banyak pihak-pihak yang tertarik dan datang untuk menguasai wilayah Inggris. Salah satu kekuasaan besar yang berhasil menguasai wilayah Inggris Raya adalah bangsa Romawi. Kekuasaan bangsa Romawi di Inggris dimulai sejak tahun 43 setelah masehi. Pada awalnya bangsa Romawi telah menunjukkan ketertarikannya untuk menguasai Inggris sejak satu abad sebelum masehi dan beberapa kali berusaha menaklukkan Inggris di bawah kepemimpinan Julius Caesar walaupun pada akhirnya usaha tersebut gagal. Hingga akhirnya bangsa Romawi berhasil menaklukkan Inggris di bawah serangan yang dipimpin oleh Kaisar Cladius (Nangonová, 2008). Kekuasaan bangsa Romawi di Inggris berakhir pada sekitar abad ke 5 bersamaan dengan runtuhnya kekaisaran bangsa Romawi yang disebabkan oleh konflik kekuasaan dan serangan kaum barbar (Penyebab Runtuhnya Kekaisaran Romawi, 2015).

Setelah bangsa Romawi mundur dari wilayah Inggris, datang sebuah suku yang berasal dari Jerman yaitu Anglo-Saxons untuk menguasai wilayah Inggris. Pada saat suku Anglo-Saxons datang, mereka masih berupa beberapa kerajaan-kerajaan kecil saling berperang untuk memperebutkan wilayah kekuasaan di Inggris. Kerajaan-kerajaan kecil tersebut kemudian bersatu di bawah Kerajaan Wessex, salah satu kerajaan Anglo-Saxons yang paling besar dan terkuat di Inggris. Namun pada tahun 1016, Raja Canute yaitu raja yang memimpin Denmark dan Norwegia pada saat itu berhasil melakukan invansi dan menguasai seluruh wilayah Inggris. Kemenangan yang berhasil didapatkan tersebut mengakibatkan untuk yang pertama kalinya seluruh wilayah Inggris secara utuh dikuasi oleh satu pemimpin yaitu Raja Canute (Nangonová, 2008).

Setelah anak dari Raja Canute meninggal seorang anak dari salah satu bangsawan terkuat di Inggris, Harold, diangkat untuk menjadi raja Inggris selanjutnya. Perebutan kekuasaan terjadi setelahnya dan terkenal dengan nama *Battle of Hastings* pada tahun 1066. Perebutan kekuasaan ini melibatkan *the Duke of Normandy* atau William yang ingin merebut kekuasaan Harold. *Battle of Hastings* dimenangkan oleh William (1066 and the Norman Conquest). Dengan bantuan dari gereja, William berhasil menunjukkan bahwa dia merupakan raja yang kompeten dan berhasil menjalankan kerajaan yang dipimpinnya hingga menjadi kerajaan terpusat yang kuat. Kerajaan Inggris semakin kuat ketika dipimpin oleh keturunannya yaitu Henry I dan terutama Henry II. Perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Inggris hingga meliputi wilayah Normandia dan sebagian wilayah Perancis berhasil dilakukan di bawah pimpinan Raja Henry II. Tidak hanya itu, Raja Henry II memulai penaklukan wilayah Irlandia pada Oktober 1171 (Ranelagh & Boland, 2019).

Pada tahun 1536 Wales dan Inggris bersatu di bawah kepemimpinan Raja Henry VIII. Keinginan Wales untuk bergabung dengan Inggris telah dinyatakan sejak tahun 1284 dalam *Statute of Wales*. Dalam persatuan antara Wales dan Inggris, masyarakat Wales memiliki status politik yang sama dengan masyarakat Inggris dan hukum yang digunakan dalam pengadilan harus menggunakan hukum umum yang berasal dari Inggris (Smith & Gruffudd, 2019). Persatuan antara Inggris dengan Wales menjadikan Raja Henry VIII sebagai raja Wales dan Inggris pertama. Inggris kembali memperluas kekuasaan kerajaannya pada tahun 1707 di mana Inggris bersatu dengan Skotlandia (Macleod & Moulton, 2019). Persatuan antara Skotlandia dengan Inggris dilakukan dalam perjanjian *Act of Union* pada 1 Mei 1707. Perjanjian tersebut yang mempengaruhi persatuan Skotlandia dan Inggris dengan nama *Great Britain* atau Inggris Raya (*the United Kingdom of Great Britain*).

Sejak Raja William III memerintah Inggris Raya, peperangan antara Inggris Raya dan Perancis dimulai. Inggris

Raya dan Perancis terus berperang selama abad 18 untuk memperebutkan keunggulan dalam bidang angkatan laut dan kekuatan kolonial. Salah satu perang antara Inggris Raya dan Perancis yang terkenal adalah *Seven Years War* yang terjadi pada tahun 1756 hingga 1763 (Editors, 2009). Inggris Raya berhasil memenangkan peperangan dengan Perancis dan mulai membangun kerajaan kolonialnya. Berkat kemenangan tersebut Inggris Raya mendapatkan label sebagai negara *super power* dan kekuatan maritimnya menjadi yang nomor satu di dunia pada saat itu. Keberhasilan Inggris Raya semakin besar dengan keberhasilan revolusi industri yang membawa efek yang sangat besar bagi Inggris Raya. Keberhasilan ini menjadikan Inggris Raya sebagai negara dengan perdagangan dan finansial yang kuat.

Selama abad ke-19 Inggris menerapkan kebijakan "*splendid isolation*" dalam hubungan diplomatiknya, yaitu kebijakan untuk menghindari aliansi permanen dengan negara lain (Veldeman). Hasil dari kebijakan ini adalah Inggris Raya lebih memilih untuk fokus kepada urusan luar negeri dan maritimnya. Dalam kebijakan ini Inggris memperhatikan imperialismenya di Afrika dan Asia. Inggris hanya mengikuti satu perang di Eropa pada abad 19 yaitu *Criemean War* (1854-1856) yang terjadi diantara Kekaisaran Rusia melawan Prancis, Inggris Raya, Kerajaan Sardinia, dan Kesultanan Ustmaniyah. Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia (*United Kingdom of Great Britain and Ireland*) terbentuk dalam *Act of Union* yang menyatakan bahwa Irlandia merupakan bagian dari Inggris Raya pada tahun 1801 (Ranelagh & Boland, 2019).

Pada abad 20 terdapat beberapa krisis yang terjadi di Inggris Raya yang mengakibatkan turunnya posisi Inggris Raya sebagai negara *super power* menjadi negara *middle power*. Turunnya posisi Inggris Raya ini diakibatkan oleh kesulitan-kesulitan yang muncul selama menghadapi perang dan kerusakan yang ditimbulkan setelah perang berakhir. Krisis lainnya adalah munculnya masalah Inggris Raya dengan Irlandia. Irlandia yang telah bersatu dengan Inggris Raya menginginkan untuk menjadi sebuah negara yang merdeka.

Tahun 1919 Republik Irlandia memutuskan untuk mendeklarasikan terbentuknya Republik Irlandia merdeka. Deklarasi terbentuknya Irlandia ini mengakibatkan munculnya konflik dengan Inggris yang berujung pada perang antara Irlandia dengan Inggris Raya. Irlandia kemudian terpecah menjadi dua bagian pada tahun 1921 yaitu, Negara Bebas Irlandia atau *Irish Free State* dan Irlandia Utara. Negara Bebas Irlandia atau *Irish Free State* memutuskan untuk menjadi negara yang merdeka dengan status dominion, sedangkan Irlandia Utara memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari Inggris Raya (Ranelagh & Boland, 2019). Republik Irlandia mendapatkan status menjadi negara yang independen dan mendapatkan konstitusi baru pada tahun 1937.

B. Hubungan Inggris Raya - Rusia

Inggris Raya telah menjalin hubungan diplomatik dengan Rusia jauh sebelum mereka menjadi aliansi di Perang Dunia I. Hubungan Inggris dengan Rusia atau sering disebut dengan *Anglo-Russian Relations* sudah dimulai sejak tahun 1553 (VanDusen, 1967). Inggris Raya menjalin hubungan resmi dengan negara lain yang tergabung dalam aliansi *Entente* atau Blok Sekutu bersama dengan Kekaisaran Rusia (sebelum menjadi Uni Soviet) dalam Perang Dunia I (1914-1918) bersama dengan Perancis, Amerika Serikat dan negara aliansi lainnya yang menentang Blok Sentral yang terdiri oleh kekaisaran Jerman, Austria-Hongaria, Kesultanan Ustmaniyah, dan Bulgaria. Aliansi ini menjadi hubungan resmi pertama Inggris Raya dengan negara lain setelah Inggris Raya meninggalkan kebijakan "*splendid isolation*" pasca runtuhnya *balance of power* di wilayah Eropa (Nangonová, 2008). Aliansi ini merupakan bagian dari kebijakan *appeasement*, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk menghalangi Hitler untuk mendapatkan apa yang dia inginkan (Veldeman).

Kemudian pada Perang Dunia II (1939-1945) Inggris Raya dan Uni Soviet kembali tergabung dalam Blok Sekutu bersama dengan Amerika Serikat dan Tiongkok melawan Blok Poros yaitu Jerman, Kekaisaran Jepang, dan Italia. Hubungan aliansi ini berakhir saat Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah ketegangan politik dan militer antara Dunia Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Dunia Komunis dengan Uni Soviet sebagai pemimpinya. Pada masa ini beberapa negara memilih untuk memihak salah satu kubu diantaranya Inggris yang memihak Amerika Serikat dan mendirikan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) bersama dengan 10 negara lainnya pada tahun 1949 (NATO, Apa yang Dilakukan Dulu dan Kini, 2018).

Inggris Raya dan Rusia tetap menjalin hubungan dengan cara bekerja sama untuk memenuhi kepentingan negaranya. Walaupun hubungan Inggris Raya dan Rusia tidak selalu berjalan dengan mulus dengan banyaknya konflik yang memutus kerjasama yang telah lama terjalin tetapi terdapat juga banyak kerjasama bilateral yang dilakukan Inggris Raya dengan Rusia diantaranya adanya deklarasi mengenai kemitraan berbasis pengetahuan untuk modernisasi antara Inggris Raya dengan Rusia di mana kedua negara ingin menambahkan beberapa kerjasama baru yang berdasarkan kepentingan dan nilai bersama kedua negara. Inggris Raya dan Rusia ingin mengembangkan hubungan perdagangan bilateral yang sudah ada sebelumnya seperti investasi dan kerjasama ekonomi. Kerjasama ini dilakukan menggunakan pengetahuan inovatif untuk memperkuat ekonomi kedua negara sehingga akan menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan sistem keuangan yang sehat sehingga investasi yang dilakukan menguntungkan kedua belah pihak (*Declaration on a Knowledge-Based Partnership for Modernisation between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Russian Federation*, 2011). Deklarasi ini ditandatangani di Moskow pada 10 September 2011.

Kerjasama antara Inggris Raya dan Rusia tidak hanya dilakukan dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam

bidang komunikasi. Pada tanggal 15 Februari 2011 dibuat perjanjian di London yaitu mengenai organisasi sistem komunikasi langsung yang dikerjakan oleh Inggris dan Rusia (Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Russian Federation on the Organisation of the Direct Encrypted Communications System between the United Kingdom of Great Britain and Nor, 2011). Pemerintah Inggris dan Rusia ingin mengembangkan lebih lanjut hubungan Inggris dan Rusia dan mempertimbangkan mengenai kepentingan bersama dalam penciptaan dan pengembangan kemampuan teknis untuk kontak rahasia di tingkat tertinggi. Sistem komunikasi ini akan terenkripsi langsung oleh Inggris Raya dan Rusia. Sistem komunikasi terenkripsi langsung ini akan menjadi alat dan saluran komunikasi yang saling terkait teknologi dan akan digunakan untuk menjamin komunikasi terenkripsi dari kepemimpinan tertinggi kedua negara dalam keadaan darurat dan dalam keadaan biasa.

Inggris Raya dan Rusia juga melakukan kerjasama dalam bidang kebudayaan, hal ini dinyatakan oleh Dmitry Medvedev, Presiden Federasi Rusia dan David Cameron, Perdana Menteri Inggris Raya. Dalam pembicaraan Presiden Federasi Rusia Dmitry Medvedev dan Perdana Menteri Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara David Cameron menyatakan kepuasan dengan tingkat kontak budaya antara kedua negara, dan mereka menekankan pentingnya ikatan budaya untuk memperkuat pengertian masyarakat dari kedua negara, serta untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Dmitry Medvedev dan David Cameron menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mendukung kerjasama budaya di semua tingkatan, mereka juga akan mendorong penyediaan fasilitas untuk kunjungan singkat antar kedua negara. Dalam pertemuan ini, untuk mendukung dan mendorong kerjasama budaya ini kedua pihak membuat proyek-proyek utama dalam jangka tahun 2011-2014 (Joint Statement by Dmitry Medvedev, President of the Russian Federation, and David

cameron, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and northern Ireland, on Cultural Cooperation, 2011).

Pengusiran diplomat Rusia dari wilayah Inggris Raya bukan yang pertama kalinya terjadi. Pengusiran diplomat Rusia dari wilayah Inggris Raya pernah terjadi pada 16 Juli 2007 (Tran, Britain expels four Russian diplomats, 2007). Pengusiran diplomat Rusia tahun 2007 tersebut terjadi karena adanya kasus pembunuhan Alexander Litvinenko. Alexander Litvinenko merupakan mantan agen Rusia yang menjadi agen ganda dan bekerja untuk Inggris Raya. Alexander Litvinenko diracuni dengan racun radioaktif *Polonium* 210 dan meninggal pada 23 November 2006 (Harding, 2016). Dari penyelidikan yang berlangsung, tersangka dalam kasus pembunuhan ini merupakan Andrei Lugovoi seorang mantan agen KGB. Dalam kasus pembunuhan Alexander Litvinenko Pemerintah Inggris Raya telah meminta Pemerintah Rusia untuk mengekstradisi Andrei Lugovoi agar dapat dilakukan sidang atas dasar pembunuhan terhadap Alexander Litvinenko. Namun permintaan Pemerintah Inggris tersebut ditolak oleh Pemerintah Rusia sehingga Pemerintah Inggris Raya memutuskan untuk mengusir empat diplomat Rusia pada 16 Juli 2007.

C. Undang-Undang Spionase di Inggris Raya

Spionase merupakan kegiatan mengumpulkan informasi rahasia yang pada dasarnya tidak ditujukan untuk konsumsi publik, dengan menggunakan sumber manusia/agen atau menggunakan cara teknis seperti meretas kedalam sistem komputer (Espionage). Kegiatan spionase merupakan ancaman bagi keamanan nasional suatu negara. Kegiatan spionase tidak hanya mencuri informasi rahasia suatu negara untuk kepentingan negara yang melakukannya, mereka juga bisa mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada publik untuk mempengaruhi para pembuat keputusan untuk kepentingan kekuatan asing. Namun tidak jarang, terkadang

pekerjaan seorang agen di suatu negara mengharuskannya melakukan tindakan yang membahayakan tidak hanya bagi negara yang menjadi target namun juga bagi masyarakat negara tersebut.

Ancaman dari kegiatan spionase ini yang menjadi alasan banyak negara yang ingin melindungi negaranya dari kegiatan spionase. Inggris Raya menjadi salah satu negara yang sangat memperhatikan dan melindungi negaranya dari ancaman kegiatan spionase. Hal ini dibuktikan dengan adanya undang-undang yang membahas mengenai kegiatan spionase dan hukumannya sejak awal abad ke 20 di Inggris Raya.

Beberapa undang-undang tersebut yaitu:

- *Official Secrets Acts* 1911, 1920, 1939, dan 1989
- *Public Records Acts* 1958 dan 1967
- *Security Service Act* 1989
- *Intelligence Services Act* 1994
- *Public Interest Disclosure Act* 1998
- *Freedom of Information Act* 2000

1. *Official Secrets Acts*

Alasan utama mengapa Inggris Raya mengeluarkan undang-undang mengenai kegiatan spionase adalah karena ketakutannya terhadap kegiatan spionase yang dilakukan oleh Jerman. Inggris Raya mendapatkan perlindungan hukum utama terhadap spionase dan pengungkapan informasi yang tidak sah dari *Official Secrets Acts* (Bartlet & Everett, 2017). *Official Secrets Acts* dikeluarkan pertama kali pada tahun 1911 dan mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memberikan batas-batas yang lebih tegas mengenai spionase seperti kegiatan-kegiatan apa saja yang masuk dalam kategori sebagai tindakan spionase, sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk melindungi Inggris Raya agar tidak terjadi pengungkapan informasi rahasia penting yang dilakukan oleh pegawai negara. Berbagai jenis pelanggaran yang termasuk dalam kegiatan sabotase, spionase dan kejahatan serupa juga dinyatakan dalam bagian pertama *Official Secrets Acts 1911*.

Official Secrets Acts 1920 dan 1939 merupakan amandemen dari *Official Secrets Acts* 1911. Salah satu bagian dari *Official Secret Acts* 1911 yang diubah terdapat dalam bagian 28 pasal 2 yang membahas mengenai orang yang secara sadar mendapatkan dan mempunyai kontrol atas informasi rahasia dalam bentuk apapun akan mendapatkan hukuman tidak lebih dari dua tahun penjara (*Official Secrets Act* 1911). Bagian yang menjelaskan mengenai hukuman tersebut mendapatkan amandemen dan berubah menjadi maksimal hukum penjara untuk terpidana spionase menjadi 14 tahun penjara. Dalam amandemen ditambahkan beberapa pelanggaran yang terkait dengan kegiatan mata-mata dan spionase yaitu penggunaan seragam polisi atau memalsukan paspor militer dengan tujuan mendapatkan akses masuk ke dalam tempat terlarang. Kemudian dalam *Official Secrets Acts 1920* menghapuskan hak untuk diam bagi tersangka yang ditahan atas tuduhan pelanggaran *Official Secrets Acts* 1911.

Official Secrets Acts yang dikeluarkan pada tahun 1989 merupakan undang-undang terakhir dalam rangkaian *Official Secrets Acts*. Pada umumnya *Official Secrets Acts* 1989 menjelaskan mengenai perbedaan dua jenis pegawai pemerintah. Jenis pegawai pemerintah yang pertama merupakan anggota maupun mantan anggota dari departemen keamanan dan intelijen, dan yang kedua merupakan pegawai kerajaan dan pegawai pemerintah (Bartlet & Everett, 2017). *Official Secrets Acts* 1989 juga menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang mengungkapkan rahasia negara kepada pihak luar merupakan pelanggaran. Seseorang yang terkait dan terikat oleh undang-undang tersebut akan mendapatkan pemberitahuan, salah satunya dicantumkan dalam kontrak kerja bagi pegawai pemerintah untuk memberikan informasi bahwa mereka diharuskan untuk memahami dan waspada dengan peraturan dalam *Official Secrets Acts*.

Pihak yang bertugas untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak di bawah tuduhan pelanggaran *Official Secrets Act* adalah *Attorney General* atau Jaksa Agung. Biasanya orang yang terbukti melakukan kegiatan spionase

akan mendapatkan hukuman yang berat. Walaupun hukuman penjara yang ditetapkan untuk kegiatan spionase adalah 14 tahun penjara berdasarkan undang-undang *Official Secrets Acts*, dalam kondisi tertentu hukuman tersebut hukuman lebih dari 14 tahun akan ditetapkan. Salah satu terdakwa yang mendapatkan hukuman lebih dari 14 tahun penjara adalah George Blake, dia mendapatkan hukuman 42 tahun penjara. George Blake merupakan seorang diplomat Inggris Raya dan mata-mata Uni Soviet, dia bekerja sebagai agen ganda sejak sekitar tahun 1950-1953. Dia mengakui bekerja sebagai agen ganda dan telah memberikan setiap dokumen penting yang telah menjadi miliknya sejak 1953 kepada pihak Uni Soviet setelah ditahan pada April 1961 (Britannica).

2. Security Service Act 1989

Official Secrets Acts bukan satu-satunya undang-undang yang menjadi dasar perlindungan keamanan nasional Inggris Raya dari kegiatan spionase, *Security Service Act 1989* juga menjadi landasan untuk perlindungan keamanan nasional. Berbeda dengan undang-undang *Official Secrets Acts* yang fokus kepada pelanggaran dan hukuman yang ditetapkan kepada agen spionase, *Security Service Act 1989* fokus bekerja untuk melindungi negara dari kegiatan spionase, terorisme, dan sabotase (National Intelligence Machinery, 2010). Undang-undang *Security Service Act 1989* memberlakukan tugas dan kewajiban pada departemen keamanan dan menegaskan bahwa departemen keamanan akan bertanggung jawab langsung kepada parlemen.

Semua fungsi dan tujuan dibuatnya *Security Service Act 1989* tercantum dalam pasal pertama dari bagian kelima *Security Service Act 1989* menyatakan bahwa :

- (1) Akan tetap ada departemen keamanan dibawah wewenang sekretaris negara.
- (2) Fungsi dari departemen ini adalah melindungi keamanan negara, terutama melindungi dari ancaman spionase, terorisme dan sabotase, dari aktivitas agen kekuatan asing dan dari tindakan

yang ditujukan untuk menggulingkan atau melemahkan demokrasi parlementer dengan cara politik, industri, dan kekerasan.

- (3) Fungsi lain dari departemen ini adalah untuk melindungi kesejahteraan ekonomi Kerajaan Inggris Raya dari ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan atau niat orang diluar Pulau Inggris. (Security Service Act 1989)

Undang-undang dalam *Security Service Act 1989* mendefinisikan peran yang dimiliki oleh *The Security Service* atau Unit Intelijen Militer bagian 5 (*Military Intelligence section 5*) atau yang dikenal sebagai MI5, yaitu sebuah agen keamanan domestik Inggris Raya yang telah didirikan sejak tahun 1909. Tugas utama MI5 adalah :

- Untuk melindungi kewanitaan nasional terutama dari ancaman terorganisir yang terselubung seperti terorisme, spionase, dan sabotase, tidak terkecuali perkembangan senjata penghancur masal, dari agen kekuatan asing, dan dari tindakan yang ditujukan untuk menggulingkan atau merusak demokrasi parlementer melalui politik, industri dan kekerasan.
- Untuk menjaga kesejahteraan ekonomi di Inggris raya dari ancaman tindakan atau maksud dari orang-orang di luar kepulauan Inggris.
- Untuk bertindak dalam mendukung polisi dan penegak hukum lainnya dalam pencegahan dan perlindungan kejahatan serius. (National Intelligence Machinery, 2010)

Untuk memenuhi semua tugas-tugas yang diberikan tersebut MI5 memiliki berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- Melakukan investigasi ancaman dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi tersebut,
- Melawan sumber ancaman,
- Memberi nasihat kepada pemerintah dan pihak lain tentang sifat ancaman, dan tentang langkah-langkah keamanan protektif yang relevan,
- Dan lembaga lain, seperti organisasi dan pemerintah dalam melawan ancaman. (National Intelligence Machinery, 2010).

3. *Intelligence Service Act 1994*

Intelligence Services Act 1994 mengatur peran dari *Secret Intelligence Service* atau yang lebih dikenal sebagai *Military Intelligence section 6* (MI6), yang menjadikan SIS bekerja berdasarkan undang-undang untuk yang pertama kalinya. Unit intelijen MI5 dan MI6 bekerja untuk melindungi keamanan nasional Inggris Raya, untuk mencegah dan mendeteksi ancaman yang berasal dari luar maupun dalam negeri, dan melindungi kegiatan ekonomi di Inggris Raya (National Intelligence Machinery, 2010)

Intelligence Services Act 1994 mengarahkan dan menjadi landasan kerja SIS yang merupakan intelijen asing rahasia untuk mendapatkan dan memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan utama Inggris Raya dalam bidang:

- Kawasan keamanan nasional, khususnya dalam bidang pertahanan dan kebijakan luar negeri,
- Kepentingan kesejahteraan ekonomi di Inggris Raya,
- Dan untuk mendukung pencegahan dan mendeteksi kejahatan yang serius. (National Intelligence Machinery, 2010)

Dari pembahasan diatas terlihat bahwa sejak awal berdirinya, Inggris Raya telah memiliki hubungan diplomatik dengan Rusia. Hubungan diplomatik antara Inggris Raya dengan Rusia tidak selalu berjalan dengan lancar. Terlihat dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Inggris Raya dan Rusia menjalin aliansi dalam Blok Sekutu untuk melawan Blok Sentral. Namun hubungan aliansi tersebut langsung runtuh ketika Perang Dingin dimulai. Inggris Raya lebih memilih untuk memihak dalam aliansi Dunia Barat dengan Amerika Serikat sebagai pemimpinya untuk melawan Uni Soviet yang memimpin Dunia Komunis.

Pengusiran diplomat Rusia dari wilayah Inggris Raya juga bukan yang pertama kalinya terjadi. Pemerintah Inggris Raya pernah mengusir diplomat Rusia dari wilayah Inggris Raya dengan kasus yang sama yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap mantan agen ganda Rusia yang juga bekerja untuk Inggris Raya. Namun setelah semua masalah telah berhasil diselesaikan hubungan diplomatik antara Inggris Raya dengan Rusia kembali normal. Inggris Raya juga merupakan salah satu negara yang sangat melindungi diri dari kegiatan spionase. Sejak awal abad 20, Inggris Raya telah banyak membuat dan mengeluarkan undang-undang tentang spionase yang menjadi dasar perlindungan bagi Inggris Raya. Sehingga apabila terjadi masalah di dalam wilayah Inggris Raya yang berhubungan dengan kegiatan spionase, Pemerintah Inggris Raya akan mengambil langkah tegas dalam penyelesaian masalah tersebut.